



Korupsi Pengadaan Kapal Nelayan di Buleleng

Ada 11 Tersangka, Dua Langsung Ditahan

DENPASAR, NusaBali

Setelah menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal nelayan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan, penyidik Pidana Khusus Kejati Bali akhirnya melakukan penahanan terhadap dua tersangka yang merupakan rekanan dalam pengadaan kapal pada, Kamis (20/7) sore. Selain rekanan, ada 9 tersangka lainnya yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Dua tersangka yang ditahan, yaitu Suyadi yang merupakan rekanan dari PT F1 Perkasa, Banyuwangi dan Fuad Bachtiar Baua Giel yang merupakan rekanan dari PT Fuad Pratama Perkasa. Kajati Bali, Djaya Kesuma mengatakan penahanan ini dilakukan setelah penyidik melakukan penyelidikan sejak setahun lalu dengan memeriksa sekitar 15 saksi.

"Penahanan yang kami lakukan saat ini juga merupakan kado untuk Hari Bhakti Adhyaksa dan persembahkan kepada masyarakat," jelas Djaya Kesuma. Dalam perkara

ini, Suyadi yang merupakan rekanan dari PT F1 Perkasa menjadi pemenang dalam pengadaan 4 unit kapal Inkamnia 30 GT milik Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2014 dengan nilai kontrak Rp 5,960 miliar. Namun setelah jatuh tempo, Suyadi yang merupakan bos PT F1 Perkasa hanya mampu mengerjakan 50 persen. Parahnya lagi, dari hasil pemeriksaan saksi ahli dinyatakan jika kapal yang baru dikerjakan sebagian ini tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

Karena gagal, pengadaan kapal untuk nelayan di Buleleng ini diambil alih Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pekerjaan lalu dilanjutkan oleh PT Fuad Pratama Perkasa milik tersangka Fuad dengan nilai kontrak Rp 9,7 miliar yang sumber dananya berasal dari APBN (pembantuan) tahun 2014. Dalam kontrak, Fuad harus melanjutkan pengerjaan 7 kapal Inkamnia 30 GT termasuk menyelesaikan 4 kapal yang sebelumnya dikerjakan PT F1 Perkasa.

Meskipun 7 unit kapal tersebut berhasil diselesaikan PT Fuad Pratama Perkasa,

namun dari hasil pemeriksaan saksi ahli dari Biro Klasifikasi Indonesia dan Syahbandar Tanjung Benoa dinyatakan jika kapal tidak bisa diserahkan karena jauh dari spesifikasi dalam kontrak. "Dari hasil perhitungan ada kerugian negara mencapai Rp 11 miliar lebih," ujar mantan Kajari Denpasar ini.

Ditegaskan Djaya Kesuma, untuk saat ini baru dua orang yang ditahan karena merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini. Terkait keterlibatan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Bali, Kajati yang baru menjabat selama 6 bulan ini tidak mau berkomentar banyak. "Sekarang kan bisa dilihat siapa yang paling bertanggung jawab, siapa yang menikmati dan siapa yang punya inisiatif. Kan perkara korupsi tidak bisa berdiri sendiri dan kami akan menyelesaikan perkara ini," tegasnya.

Sementara itu, Aspidus Kejati Bali, Polin O Sitanggang menyatakan selain dua tersangka yang ditahan masih ada 9 tersangka lainnya yang

kini masih dalam proses. Ia mengatakan dua tersangka yang merupakan rekanan ditahan karena memang menjadi pihak yang bertanggung jawab. Untuk penahanan tersangka lainnya akan menyusul. "Nanti kan ada tahapannya," ujar Polin didampingi Kasi Penkum dan Humas, Erwin Beslar. Ditegaskannya, untuk 9 tersangka lainnya ini berasal dari pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Bali. Namun Polin enggan berkomentar lebih lanjut siapa saja tersangka tersebut. "Kalau kita prinsipnya siapa saja yang berbuat harus bertanggung jawab," tegasnya.

Seperti diketahui, kasus ini berawal dari penolakan kelompok nelayan di Buleleng terkait serah terima kapal nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Bali. Salah seorang nelayan yang sudah diperiksa bernama Baidi Sufarlan mengatakan jika kapal yang diserahkan berbeda dengan permintaan nelayan. Malah para nelayan mengatakan kapal tersebut jauh dari kata layak. rez

Edisi : Kamis Jumat, 21 Juli 2017

Hal : _____



Kejari Tetapkan Dua Tersangka

★ Korupsi Proyek Senderan Tukad Mati di Legian, Kuta

Dari taksiran
penyidik, akibat
dari perbuatan
para tersangka
mengakibatkan
kerugian Rp 700 juta
dari nilai proyek Rp
2,2 miliar.

DENPASAR, NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar akhirnya menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek senderan Tukad Mati di Legian, Kuta, Badung. Dua tersangka ini, yakni Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas Pekerjaan dan Umum Penataan Ruang (PUPR) Badung, I Wayan Se dan rekanan proyek, yaitu Dirut PT Undagi Jaya Mandiri, I Wayan Su.

"Penetapan tersangka ini merupakan kado untuk Hari Bhakti Adhyaksa," tegas Kejari Denpasar, Erna Noormawati Widodo Putri didampingi Kasi Pidsus, Tri Syahru Wira Kosadha dan Kasi Intel Humas, IGA Kusumayasa Diputra di Kejari Denpasar, Kamis (20/7) malam.

Penetapan dua tersangka ini sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan 15 saksi termasuk saksi ahli dari salah satu Uni-

versitas ternama di Jawa Barat. Dari hasil penyidikan terungkap, rekanan proyek dalam melaksanakan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. "Banyak kekurangan volume dan mutu dalam pengerjaan proyek ini," tegas Erna.

Sementara itu, I Wayan Se sebagai PPTK tidak melaksanakan tupoksi sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan proyek yang dikerjakan tidak sesuai kontrak. I Wayan Se seharusnya melakukan pengawasan dalam proyek sehingga tidak terjadi penyimpangan. Terkait kerugian negara, penyidik masih menunggu hasil perhitungan resmi dari BPKP Wilayah Bali.

Namun dari taksiran penyidik, akibat dari perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian Rp 700 juta dari nilai proyek Rp 2,2 miliar. "Kami masih menunggu hasil resmi kerugian negara dari BPKP Wilayah Bali," lanjut mantan Aspidus Kejati Bali ini. Terkait tersangka lainnya, Erna mengatakan masih didalami. Pasalnya, dalam perkara ini diduga masih ada pejabat di Dinas PUPR yang terlibat termasuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Kepala Dinas PUPR sebagai Pengguna Anggaran (PA). "Kemungkinan besar akan ada tersangka lainnya. Tapi kami akan fokus untuk dua tersangka ini dulu,"

tegasnya.

Kasus ini sendiri berawal dari laporan warga yang mengatakan jika pembangunan senderan Tukad Mati di Legian, Kuta mengalami masalah. Pasalnya, baru saja selesai dan diserahkan, sudah ada beberapa bagian yang retak dan jebol. Proyek senderan Tukad Mati tersebut membentang sepanjang 570 meter dengan anggaran Rp 2,1 miliar yang digarap oleh PT Undagi Jaya Mandiri sejak awal 2016 lalu.

Dalam perkara ini, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi. Selain rekanan dari PT Undagi Jaya Mandiri, beberapa pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Badung sudah dimintai keterangannya. Di antaranya, Kadis PUPR Badung IB Surya Suamba, AA Gede Dalem, Anggota Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) I Gede Sumaradana.

Terkait penetapan tersangka salah satu bawahannya, Kepala Dinas PUPR Badung IB Surya Suamba saat dikonfirmasi, semalam tak banyak memberikan komentar. Namun demikian, pihaknya menegaskan menghormati proses hukum yang kini sedang berjalan. "Saya selaku Kepala Dinas tentu menghormati proses hukum. Saya pun akan kooperatif agar masalah ini menjadi lebih jelas," kata Surya Suamba singkat. **rez**

Edisi : Jumat, 21 Juli 2017

Hal : 15



Disdik Tabanan Terima Kucuran Pusat Rp 3,3 Miliar

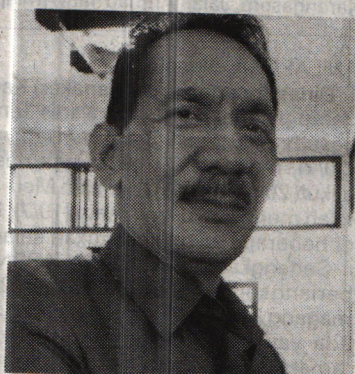
★ Dialokasikan untuk Pengadaan
Buku Perpustakaan

TABANAN, NusaBali

Pemerintah Pusat gelontorkan dana sebesar Rp 3,3 miliar untuk anggaran pengadaan buku di perpustakaan sekolah di Kabupaten Tabanan. Dana sebesar Rp 3,3 miliar ini akan diberikan kepada 66 SD dari 326 SD se-Tabanan. Sisanya sebanyak 260 SD akan diusulkan kembali agar mendapat dana pengadaan buku untuk perpustakaan sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Tabanan, I Wayan Adnyana mengatakan, bantuan dana pusat sebesar Rp 3,3 miliar untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 2013. Sekaligus mendukung program Dinas Pendidikan Tabanan untuk mewujudkan siswa gemar membaca. Ada 65 SD yang mendapatkan anggaran tersebut. Masing-masing mendapat bantuan Rp 50 juta atau setara 850 buku. "Bagi sekolah yang belum mendapat anggaran, akan kamu usulkan lagi," ungkap Adnyana, Kamis (20/7).

Adnyana mengatakan, pengadaan buku perpustakaan di tingkat SD sangat penting untuk mendukung kurikulum 2013. Buku yang didapatkan selain



• NUSABALI/DESAK

I Wayan Adnyana

buku penunjang kurikulum, ada pula buku penunjang pembelajaran lainnya. "Para siswa kami harapkan memanfaatkan jam kosong dengan selalu membaca buku di perpustakaan," pinta mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tabanan ini. Ditambahkan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Tabanan tengah melakukan proses lelang terkait pengadaan buku koleksi perpustakaan, buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidikan dengan anggaran Rp 3,3 miliar.  d

Edisi : Jumat, 21 Juli 2017

Hal : 7



Anggota DPRD Bali Makin Tajir

★ Pendapatan Akan Bertambah Berkat
Terbitnya PP Nomor 19 Tahun 2017

DENPASAR, NusaBali

Pendapatan para anggota DPRD Bali yang berjumlah 55 orang akan bertambah lagi. Ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang memberikan ruang tambahan-tambahan pendapatan bagi anggota Dewan.

Rencana tambahan pendapatan anggota DPRD Bali ini sudah dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Bali dan DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar,

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

PENDAPATAN PARA ANGGOTA DPRD BALI SEBELUM TERBITNYA PP NOMOR 18 TAHUN 2017

• Gaji Pokok (*)	: Rp 8,00 Juta
• Dana Perumahan *)	: Rp 20,00 Juta
• Dana Kunker **) ke Luar Daerah	: Rp 9,00 Juta
• Dana Kesehatan *)	: Rp 1,60 Juta
• Biaya Kunker ***) Dalam Daerah	: Rp 0,56 Juta
• Tunjangan Mobil Dinas	

KETERANGAN

- *) Dibayar rutin setiap bulan
**) Dilakukan 2 kali dalam sebulan
***) Nominal untuk sekali kunjungan



Anggota DPRD Bali Makin Tajir

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Kamis (20/7). Rapat kemarin dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry.

Dalam rapat pembahasan TPAD kemarin, para anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali juga dilibatkan. Sementara dari eksekutif, hadir Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali, I Putu Astawa. Rapat yang digelar tertutup untuk media ini memastikan mekanisme pemberian tunjangan bagi anggota De-

wan, mengacu aturan terbaru PP 18/2017. Sebelum terbitnya PP 18/2017, pemberian tunjangan untuk para wakil rakyat mengacu ke PP Nomor 24 Tahun 2004.

Informasi yang dihimpun NusaBali, ada beberapa tunjangan yang diatur dengan PP 18/2017 hingga membuat anggota DPRD Bali semakin tajir dan nyaman. Misalnya, soal penambahan uang reses bagi anggota Dewan, namun nominalnya masih dalam pembahasan. Demikian pula uang transportasi anggota Dewan yang mulai dianggarkan.

Sebelum terbitnya PP 18/2017, tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD Bali, selain rumah dinas dan mobil dinas, juga ada biaya kesehatan, biaya perjalanan dinas ke luar daerah, dan biaya kunjungan kerja dalam daerah ketika menyampaikan aspirasi.

Dana Perumahan bagi anggota DPRD Bali mencapai Rp 20 juta per bulan, jauh melebihi gaji pokok sebesar Rp 8 juta sebulan. Sedangkan untuk dana kesehatan mencapai 1,6 juta per bulan. Sementara kunjungan kerja ke luar daerah yang dilakukan dua

Edisi : Jumat, 21 Juli 2017

Hal : 1 dan 15



kali sebulan mencapai Rp 9 juta. Sebaliknya, biaya kunjungan kerja dalam daerah mencapai Rp 0,56 juta dalam sekali kunjungan. Kini, dengan diposkannya anggaran reses dan transport sesuai PP 18/2017, anggota Dewan akan semakin tajir.

Sementara itu, se usai rapat TPAD kemarin, Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali, Putu Astawa, mengatakan untuk pelaksanaan PP 18/2017, sudah disiapkan anggaran tambahan sebesar Rp 10 miliar yang dipasang di APBD Perubahan 2017. "Untuk

penambahan tunjangan anggota Dewan akan dipasang sebesar Rp 10 miliar di APBD 2017. Ini masih berjalan pembahasannya," jelas Putu Astawa.

Untuk pemenuhan tunjangan anggota Dewan sesuai dengan aturan terbaru PP 18/2017 ini, kata Astawa, eksekutif terpaksa melakukan penyisiran lagi pos-pos anggaran. Salah satunya, memangkas anggaran bimbingan dan teknis (Bintek) jajaran eksekutif. Penyisiran anggaran ini sudah menjadi kesepakatan.

"Tapi, program yang memang urgent tetap diprioritaskan. Sekali lagi, ini amanat dari

aturan PP 18/2017 yang harus dilaksanakan," ujar birokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar yang juga mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali ini.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan pembahasan PP 18/2017 sudah berjalan. Dan, semuanya sedang dirancang bersama-sama sesuai aturan terbaru. Misalnya, untuk dana reses anggota Dewan yang sebelumnya tidak ada dan hanya berupa biaya operasional, kini akan ada anggarannya. "Ya,

kalau dulu hanya operasional saja, sekarang dirancang ada anggarannya," jelas Sugawa Korry yang juga Sekretaris DPD I Golkar Bali.

Bukan hanya itu. Menurut Sugawa Korry, dana transportasi bagi anggota Dewan yang sebelumnya tidak ada, kini dirancang ada anggarannya. "Dulu kan istilahnya pinjam pakai. Sekarang dirancang ada anggaran transportasi. Tapi, ini baru rancangan, karena masih menunggu Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri, Red)," tegas politisi senior Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini. **nat**

Edisi : Jumat, 21 Juli 2017

Hal : 15